

[Home](#) / [KIWARI](#) / [POLITIK](#)[/ Hadapi Krisis Regulasi, Anggota DPR Desak Pembentukan Undang-Undang Karbon](#)

Hadapi Krisis Regulasi, Anggota DPR Desak Pembentukan Undang-Undang Karbon



Restu Hanif

Nov 19, 2025



Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Foto: ist.

KOSADATA — Anggota Komisi IV DPR RI, [Daniel Johan](#) menekankan bahwa saat ini Indonesia memerlukan Undang-Undang khusus yang mengatur [tata kelola](#) karbon ditengah dinamika pasar karbon global.

"Kita butuh mendorong [Undang-Undang Karbon](#). Karena dengan [Undang-Undang Karbon](#) ini menjadi payung hukum untuk seluruh peraturan yang ada, sehingga tidak saling

tumpang tindih, tetapi saling mendukung," kata Daniel pada Rabu, 19 November 2025 di Jakarta.

Baca juga: [Kemenparekraf-KBRI New Delhi Ikuti Pameran Pariwisata SATTEE 2023 di India](#)

Daniel menilai, kehadiran UU Karbon yang juga disertai dengan pembentukan Badan Karbon Nasional akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen karbon yang kuat di mata dunia.

"Salah satunya kita bisa dorong dibentuknya Badan Karbon Nasional. Badan Karbon Nasional inilah sebagai entitas, sebagai lembaga di bawah Presiden yang bisa mengorkestrasi karbon dengan baik," ucapnya.

Baca juga: [Antrean Halalbihalal Mengular hingga Taman, Gubernur Pramono: Jakarta Terbuka untuk Pendetang](#)

Daniel mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi sebagai respon dalam menyikapi pasar karbon global, seperti Perpres 98 tahun 2021, Permen LHK 21 tahun 2022, Permen ESDM 16 tahun 2023, Permenkeu 21 tahun 2024, dan yang terbaru, Perpres 110 tahun 2025.

Namun, Daniel menyebut bahwa banyaknya regulasi tersebut justru menimbulkan pertanyaan dari para pelaku usaha karbon, dimulai dari perizinan, cara pengolahan, hingga tata perusahaan. Hal tersebut yang mendasari pemikiran bahwa Indonesia butuh aturan dan otoritas tunggal dalam tata kelola karbon.

Ia juga mengingatkan bahwa regulasi yang jelas bukan hanya persoalan hukum, namun juga cara negara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

"Tanpa kepercayaan, regulasi menjadi keraguan. Dengan kepercayaan, regulasi berubah menjadi kepastian. Inilah fondasi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang arsitektur nasional," pungkasnya.***

Update terus berita terkini KOSADATA di [Google News](#).

Tags :

Undang-Undang
Karbon

Daniel
Johan

tata
kelola

Related Post

NASIONAL



Kemenparekraf-KBRI New Delhi Ikuti Pameran Pariwisata SATTEE 2023 di India

Feb 06, 2023

MEGAPOLITAN



Antrean Halalbihalal Mengular hingga Taman, Gubernur Pramono: Jakarta Terbuka untuk Pemandang

Apr 08, 2025

Post a Comment

Enter Your Name

Enter Your email

Type Your Comments

Submit

